

Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Beserta Kontribusinya Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro

Moehadi, S.E., M.M.

Fakultas Ekonomi-Universitas Bojonegoro

Abstrak

Salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah mempunyai kemampuan untuk lebih ditingkatkan karena masih banyak sumber-sumber pendapatan retribusi daerah yang masih bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah, dengan membatasi pada retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dimana kurun waktu yang digunakan mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dengan mengambil permasalahan tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro, serta dari buku-buku dimana kurun waktu yang digunakan mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dengan mengambil permasalahan tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus. Alat analisis yang digunakan dengan statistik deskriptif dan analisis rasio, analisis efisiensi dan efektifitas. Dengan menggunakan Analisis Efisiensi dan Efektivitas maka dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efisiensi penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Bojonegoro sudah berada pada kategori efisien. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perbandingan antara biaya pungutan (biaya operasional) dengan target penerimaan retribusi parkir yang memenuhi kriteria efisiensi.

Katakunci – efektifitas, efisiensi, pajak retribusi, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru disamping mengatur pemerintahan daerah juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang berasal dari pusat, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga

membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah. Salah satu wujud dari pelaksanaan Desentralisasi Fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dimana daerah diberikan kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian daerah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar daerah mampu menjadi daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Salah satu aspek kemandirian daerah yang sangat penting adalah dalam bidang keuangan yaitu kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah dilihat dari kemampuan daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Retribusi Parkir adalah apabila Penerimaan Retribusi Parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan maka dengan sendirinya Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan atau akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah. Apabila dalam Penerimaan retribusi Parkir setiap tahunnya mengalami penurunan maka secara otomatis akan mengurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan, maka Pendapatan Asli Daerah harus selalu diupayakan agar dapat terus meningkat setiap tahunnya yaitu dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam sektor retribusi daerah yaitu dalam bidang retribusi parkir.

Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu selalu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah Pusat mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan jalannya pemerintahan di daerah dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas. Kepada pemerintah daerah terutama dibidang keuangan daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah agar memungkinkan daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi daerah agar dapat membiayai rumah tangganya sendiri, maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi. Pengertian retribusi secara umum didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004 : 115).

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam era reformasi ini diatur dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok sebagai kebijaksanaan dan petunjuk daerah dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan secara rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan agar sedapat mungkin menitik beratkan perhatiannya kepada penggalan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu berperan lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Mengingat PAD merupakan sumber pembiayaan utama dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka usaha peningkatan penerimaan PAD merupakan suatu hal yang sangat penting, atau setidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya. Diharapkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat tercipta otonomi daerah.

Salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah mempunyai kemampuan untuk lebih ditingkatkan karena masih banyak sumber-sumber pendapatan retribusi daerah yang masih bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah, dengan membatasi pada retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus.

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut a) Mengetahui kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro, b) Mengetahui efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus pada Kabupaten Bojonegoro, c) Mengetahui prospek penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus pada Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dimana kurun waktu yang digunakan mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dengan mengambil permasalahan tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan

tempat khusus terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Data yang akan digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh melalui instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro, serta dari buku-buku, literatur dan majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pertimbangan menggunakan data sekunder berdasarkan sifat dan karakteristik data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti sudah dapat memperoleh data sesuai dengan karakteristik pada penelitian ini.

Untuk membuktikan Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan alat analisis berupa:

Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan

Analisis Matriks Kontribusi dan pertumbuhan adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung besarnya sumbangan dari sektor tertentu terhadap sektor lainnya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya sumbangan yang dapat diberikan dari sektor tersebut dan sebagai alat untuk menentukan dalam kategori apa sektor tersebut berada dalam peranannya dalam memberikan sumbangan terhadap sektor yang lain apakah prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Perhitungan matriks kontribusi pada variabel penerimaan Retribusi Parkir di jalan umum dan tempat khusus terhadap Pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui perbandingan antara Penerimaan Retribusi Parkir dengan Pertumbuhan Pendapatan asli daerah untuk mengetahui Pertumbuhan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus, sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan apakah peranan penerimaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus Terhadap Pendapatan asli daerah bersifat Prima, Potensial berkembang dan terbelakang.

	$\frac{R\Delta \text{Retribusi Parkir}}{\Delta PAD} > 1$	$\frac{R\Delta \text{Retribusi Parkir}}{\Delta PAD} < 1$
$\frac{R\sum RP}{\Delta PAD} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{R\sum RP}{\Delta PAD} < 1$	Potensial	Terbelakang

Gambar 1. Kuadran Perkembangan Retribusi Parkir

Metode Analisis Rasio

Tingkat efektifitas

Tingkat efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target perolehan retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir dikatakan efektif apabila nilai rasionya lebih besar atau sama dengan satu (Devas,1989:148). Menurut Jones dan Pendlebury (1996), efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat Efektivitas Retribusi Parkir dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{R \text{ Realisasi}}{T \text{ Target}}$$

Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi adalah rasio antara biaya pungut dengan realisasi penerimaan. Penerimaan retribusi parkir cukup efisien bila nilai rasionya kurang dari 25% (Devas, 1989:149). Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury (1996), Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antara *output* dengan *Input*. Bila di lihat dari segi *Input*, efisiensi berorientasi pada penghematan (Syamsi, 1993:12). Sedangkan bila dilihat dari segi output efisiensi berorientasi pada produktivitas. Tingkat Efisiensi Retribusi Parkir dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut}}{\text{Rendahnya Parkir}}$$

Model Trend Linear

Analisis Trend linear digunakan untuk melakukan peramalan tentang perkembangan suatu variabel yang diteliti pada waktu mendatang. Analisis trend linear dapat dirumuskan di bawah ini :

Bentuk umumnya adalah : $Y = a + bt$

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan persamaan normal sebagai berikut

$$\sum Y = na + b\sum t \quad \text{dan} \quad \sum Yt = a\sum t + b\sum t^2$$

Tujuan digunakannya trend linear adalah sebagai peralatan untuk melihat perkembangan trend dari hubungan variabel Y dan t, dimana perkembangan arah hubungan tersebut tergantung pada koefisien b.

- Apabila $b < 0$, maka perkembangan trend dari pada Penerimaan Retribusi Parkir di daerah tersebut menurun.
- Apabila $b > 0$, maka perkembangan trend dari pada Penerimaan Retribusi Parkir di daerah tersebut naik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Anggaran Pendapatan Daerah Bojonegoro Tahun 2007 dapat dilihat bahwa sebagai penerimaan atau pendapatan daerah tahun 2007 yang terbesar diperoleh dari pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yaitu memberikan kontribusi sebesar 260.313.989.585 milyar rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 54.815.684.238 milyar rupiah terhadap penerimaan daerah.

Pajak daerah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sampai saat ini masih belum dapat memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah secara keseluruhan. Retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sekalipun cukup menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, akan tetapi belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah yang utama. Perusahaan daerah, Dinas daerah dan pendapatan lain-lain yang sah hanya memberikan kontribusi yang kecil sekali dalam menopang pendapatan, daerah. Secara umum subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat menduduki tempat teratas dalam menopang keuangan. Sebagai konsekuensi dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka daerah-daerah sampai saat sekarang tetap mengandalkan pemerintah pusat sebagai pengeksport energi bagi dirinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penerimaan Retribusi Parkir

TABEL 1. TINGKAT EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR BOJONEGORO 1997 – 2006

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Efisiensi
1997	633.384.425	196.265.453	0,309
1998	706.122.400	216.512.317	0,306
1999	788.415.200	254.126.658	0,322
2000	846.231.350	247.236.897	0,292
2001	1.021.840.000	346.289.498	0,338
2002	1.152.620.000	405.148.257	0,351
2003	894.036.350	264.340.800	0,295
2004	723.500.050	243.319.400	0,336
2005	1.097.006.000	387.653.400	0,353
2006	1.291.033.900	453.295.159	0,351

Sumber : Hasil analisa data sekunder

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bojonegoro dari awal periode penelitian sampai akhir periode penelitian yaitu mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan nilai efisiensi yang stabil yaitu berkisar pada nilai 0,29 pada tahun anggaran 2000 sampai 0,35 pada tahun 2005. Rata-rata efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Bojonegoro mulai tahun anggaran 1997 sampai dengan tahun 2006 adalah 0,325. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bojonegoro telah efisien. Tercapainya efisiensi penerimaan parkir Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh sudah baiknya pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta peraturan-peraturan dan tarif yang ditentukan. Disamping itu petugas pemungut parkir juga telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pemungutannya.

Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir

TABEL 2. EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KAB. BOJONEGORO 1997 – 2006

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas
1997	620.000.000	633.384.425	1,0215
1998	671.876.000	706.122.400	1,0509
1999	748.475.000	788.415.200	1,0533
2000	815.475.000	846.231.350	1,0377
2001	1.020.000.000	1.021.840.000	1,0018
2002	1.150.000.000	1.152.620.000	1,0022
2003	881.325.000	894.036.350	1,0144
2004	715.000.000	723.500.050	1,0118
2005	1.075.000.000	1.097.006.000	1,0204
2006	1.275.000.000	1.291.033.900	1,0125

Sumber : Hasil analisa data sekunder

Tabel 2 menunjukkan tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir di Bojonegoro mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006. dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir sudah efektif karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya lebih besar atau sama dengan satu. Telah efektifnya penerimaan retribusi parkir ini disebabkan oleh peraturan yang sudah tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu mengenai tarif parkir pada tiap-tiap lokasi umum dan perbelanjaan, dan kondisi ekonomi di Bojonegoro. Di samping itu keefektifan penerimaan retribusi parkir di Bojonegoro tidak terlepas dari peran pemungut retribusi parkir yang melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada serta kesadaran dan ketaatan masyarakat di Bojonegoro dalam membayar parkir.

TABEL 3. PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PERTUMBUHAN PAD

No	Tahun	Nilai
1	1998	0,3527
2	1999	0,5699
3	2000	0,4322
4	2001	2,2311
5	2002	0,6096
6	2003	1,8770
7	2004	1,6710
8	2005	0,3748
9	2006	0,5326
Rata-rata		0,1727

Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

TABEL 4. KRITERIA KINERJA RETRIBUSI PARKIR BOJONEGORO 1997-2006

Tahun	Kinerja Retribusi Parkir
-------	--------------------------

Tahun	Kinerja Retribusi Parkir
1997	Terbelakang
1998	Terbelakang
1999	Terbelakang
2000	Terbelakang
2001	Berkembang
2002	Terbelakang
2003	Terbelakang
2004	Terbelakang
2005	Terbelakang
2006	Terbelakang
Rata-rata	Terbelakang

Sumber : Hasil Perhitungan pengolahan data

Dari hasil perhitungan pertumbuhan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan daerah dapat dikatakan bahwa retribusi parkir di Bojonegoro selama periode penelitian berada dalam kriteria terbelakang. Karena rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah < 1 dan rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah < 1 maka pendapatan pemerintah daerah dari sektor retribusi daerah khususnya retribusi parkir masih dalam kategori terbelakang. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Bojonegoro masih kecil bila dibandingkan dengan sektor penerimaan retribusi lainnya.

Model analisis trend

Analisis Trend linear digunakan untuk melakukan peramalan tentang perkembangan suatu variabel yang diteliti pada waktu mendatang. Analisis trend linear dapat dirumuskan di bawah ini :

Bentuk umumnya adalah : $Y = a + bt$

Keterangan :

Y : Jumlah penerimaan dari retribusi parkir (Rupiah)

a : Konstanta

b : Besar perubahan variabel Y pada setiap perubahan satu unit variabel x.

X : Tahun

Hasil Perhitungan di atas bila menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan komputer dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 5. HASIL REGRESI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR

<i>Statistik Regresi</i>	
<i>Multiple R</i>	0,64526363
<i>R Square</i>	0,416365152
<i>Adjusted R Square</i>	0,332988745
<i>Standard Error</i>	167082095
<i>Observations</i>	9

Sumber : Hasil analisa data dengan SPSS

TABEL 6. UJI F PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR

Uraian	df	F	Signifikansi F
Regresi	1	4,9938	0,060551176
Residu	7		
Total	8		

Sumber : Hasil analisa data sekunder

TABEL 7. UJI T PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR

	Koefisien	Std Error	t _{hitung}	Probabilitas
Intercept	946756138,9	55694031,65	16,99924	0,0000
X Variabel 1	48202535,83	21570205,71	2,234681	0,06055

Sumber : Hasil analisa data sekunder

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat persamaan trend linear yaitu :

$$Y = 946.756.138,9 + 48.202.535,83X$$

Berdasarkan persamaan linier di atas dengan titik asal trend pada tahun 2006 maka dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan pertumbuhan penerimaan retribusi

parkir di Bojonegoro menunjukkan kearah positif, dengan ditunjukkan besaran intersep (b) sebesar 48.202.535,83.

Atas dasar persamaan linear yang telah di dapatkan di atas, maka dapat ditentukan besarnya trend dari perkembangan penerimaan retribusi parkir di Bojonegoro untuk lima tahun mendatang. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

TABEL 8. TREND PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR BOJONEGORO TAHUN 2007 – 2011

Tahun	X		Trend
2007	5	Rp	1.187.768.818
2008	6	Rp	1.235.971.354
2009	7	Rp	1.284.173.890
2010	8	Rp	1.332.376.426
2011	9	Rp	1.380.578.961

Sumber : Hasil analisa data sekunder

Hasil perhitungan tabel 8 memperlihatkan bahwa trend perkembangan penerimaan retribusi parkir di Bojonegoro selama lima tahun mendatang menunjukkan peningkatan dan mengalami perkembangan yang menyakinkan.

Pembahasan

Efisiensi dan Efektifitas Retribusi Parkir Bojonegoro 1997 – 2006

Dari hasil analisis data dengan menggunakan alat analisis efisiensi dan efektifitas yang telah dilakukan diperoleh bahwa penerimaan retribusi parkir di Bojonegoro telah berada dalam kategori efektif dan efisien karena berdasarkan nilai efisiensi yang diperoleh menunjukkan penerimaan retribusi parkir Kabupaten Bojonegoro mempunyai nilai dibawah satu dan dari analisis efektifitas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kabupaten Bojonegoro mempunyai nilai di atas angka satu. Hal ini berarti kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola

retribusi parkir bila ditinjau dari analisis efisiensi dan efektifitas telah tepat dalam peranannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Bojonegoro

Dari hasil analisis dengan analisis matriks kontribusi diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bojonegoro masih dalam keadaan terbelakang karena rata-rata Kontribusi Pertumbuhan Restribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah mempunyai nilai kurang dari satu dan juga perhitungan Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah juga mempunyai nilai yang kurang dari 1. Hal ini berarti sumbangan yang diberikan oleh penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah masih kecil sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Perkembangan Retribusi Parkir

Dari analisis trend linear yang dilakukan, diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari hasil trend linear selama lima tahun diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berarti pada masa mendatang penerimaan retribusi parkir masih dapat ditingkatkan dan dioptimalkan penerimaannya daripada saat sekarang oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dengan menggunakan Analisis Efisiensi dan Efektivitas maka dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efisiensi penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Bojonegoro sudah berada pada kategori efisien. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perbandingan antara biaya pungutan (biaya operasional) dengan target penerimaan retribusi parkir yang mempunyai nilai kurang dari satu yang berarti telah memenuhi kriteria efisiensi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bojonegoro telah benar, baik itu dalam penetapan peraturan, dan pelaksanaannya di lapangan sehingga kebocoran-kebocoran yang disebabkan penyelewengan oleh aparat terkait baik itu penentu kebijakan maupun pelaksana dapat ditekan seminimal mungkin.

- 2) Dari hasil analisis rasio efektifitas dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bojonegoro sudah berada dalam kategori efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas yang diperoleh nilai efektifitas pada tahun penelitian yang lebih besar dari satu yang berarti telah efektif. Nilai perbandingan antara penerimaan retribusi parkir dan target yang ditetapkan selalu lebih besar dari satu hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selalu tercapai bahkan bisa melampauinya.
- 3) Dari analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan sektor penerimaan dari retribusi lainnya misalnya dari sektor retribusi pasar.
- 4) Dari analisis trend linear diketahui bahwa perkembangan penerimaan retribusi parkir untuk periode lima tahun mendatang akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 1997. *Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Anonimous, 1999. *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999* tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonimous, *Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999* Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Anonimous, 2000. *Undang Undang Nomor 34 tahun 2000* tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Anonimous, 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 – 66 tahun 2001* tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Anonimous, 2004. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonimous, *Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Abdullah Piter, dkk. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. BPF. Yogyakarta.
- Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Boediono. 1998. *Ekonomi Makro Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi II*. BPFE. Yogyakarta.

Djarwanto PS. 1993. *Statistik Induktif*. BPFE. Yogyakarta.

Guritno Mangkusubroto. 1999. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta.

Ibnu Syamsi. 1993. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bima Aksara. Jakarta.

- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Mankiw, N Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, BPFE. Yogyakarta.
- M. Suparmoko. 2000. *Otonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.